



**JUMAT, 11 MEI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

# Temuan BPK Belum Ditindaklanjuti

**TAIS, BE** - Temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu, 2014, hingga kini belum ditindaklanjuti. Temuan terhadap pekerjaan pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 7 miliar sampai sekarang belum dipungut. Padahal BPK memerintahkan kepada Inspektorat segera memungut kerugian negara

tersebut kepada penyedia barang dan jasa. Karena dari hasil audit BPK ditemukan adanya kekurangan pekerjaan melibatkan 11 penyedia barang dan jasa.

"Memang hasil audit realisasi anggaran 2014, ada yang belum tertagih. Karena audit BPK di Dinas PU sebesar Rp 7 miliar belum dibayarkan. Kami kesulitan menemui penyedia barang dan jasanya.

Apalagi sebagian ada yang sedang menjalani proses hukum," tegas Inspektur Inspektorat Seluma Drs Ramlan Fahmi didampingi Kasubag Evaluasi Beny Anggoro SE.

Lebih lanjut, Kasubag Evaluasi mengatakan, untuk audit BPK yang dikeluarkan 2017, terhadap realisasi anggaran 2016. Di Dinas PU Seluma juga kembali ada temuan. Yakni mengenai pencairan

uang jaminan. Karena adanya sejumlah pekerjaan yang diputus kontrak. Uang jaminan harus segera dicairkan dan disetorkan ke kas daerah. Dengan total Rp 500 juta lebih. Meski sudah ada beberapa yang menyetorkan, namun bukti setorannya belum diserahkan ke Bagian Evaluasi Inspektorat Seluma. Di Dinas PU pada 2016 juga ditemukan adanya kekurangan fisik seni-

lai Rp 7,4 miliar. Kekurangan fisik ini sudah diselesaikan oleh penyedia barang dan jasa. Selain di Dinas PU Seluma, temuan BPK erbesar juga terdapat di Sekretariat DPRD Seluma. Seperti kelebihan perjalanan dinas Rp 520 juta yang belum disetorkan ke kas daerah hingga kemarin. Ditambah lagi mengenai uang persediaan (UP) yang terlambat disetorkan sebesar

Rp 6,5 miliar.

"Untuk surat perjalanan dinas (SPj) kas yang tekor ini sudah diselesaikan Sekretariat DPRD Seluma. Jadi untuk DPRD tinggal temuan masalah perjalanan dinas yang belum dikembalikan," tegas Beny lagi.

Sedangkan untuk masalah tindak lanjut penyelesaian temuan audit BPK terhadap PT Puguk Sakti Permai

(PSP) yang jumlahnya mencapai Rp 8 miliar yang diharuskan pula diselesaikan. Auditor Inspektorat enggan berkomentar mengenai hal ini.

"Untuk masalah sejauhmana tindak lanjut PT PSP, kami tidak bisa memberikan informasi apakah sudah selesai atau belum, silahkan menanyakan langsung kepada pak Sekda," pungkasnya. (333)